



Keorganisasian PGRI DKI Jakarta dan Perannya dalam Pengelolaan Dana Hibah untuk Guru Swasta Tahun 2018

Rani Noviyanti¹, Nurbaity²

Universitas Indraprasta PGRI, Jl. Raya Tengah Gedong, Jakarta, Indonesia^{1,2}

*Email Korespodensi: rasyaraninew@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the organizational structure of PGRI DKI Jakarta and its role in managing grant funds for private school teachers in 2018. The research employs the historical method through four stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data were collected from policy documents, technical guidelines of the grant program, organizational archives, and academic literature on educational finance management and public financial governance. The findings indicate that PGRI DKI Jakarta played a strategic role as a mediator between the provincial government and private school teachers, as an administrative executor in the data collection and verification process, and as an internal supervisor in the distribution of grant funds. Although the organizational structure supported program implementation, challenges were identified in transparency, reporting systems, and administrative capacity. The grant program contributed positively to improving the welfare of private school teachers, albeit as supplementary income. This study highlights the importance of strengthening accountability and transparency principles in involving professional organizations in public fund management to ensure effective and sustainable educational policy implementation.

Keywords: PGRI DKI Jakarta, grant funds, private school teachers, educational governance, accountability, transparency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis keorganisasian PGRI DKI Jakarta dan perannya dalam pengelolaan dana hibah bagi guru swasta tahun 2018. Penelitian menggunakan metode sejarah melalui empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh dari dokumen kebijakan, pedoman teknis dana hibah, arsip organisasi, serta literatur akademik mengenai manajemen pembiayaan pendidikan dan tata kelola keuangan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PGRI DKI Jakarta berperan strategis sebagai mediator antara pemerintah daerah dan guru swasta, pelaksana administratif dalam proses pendataan dan verifikasi, serta pengawas internal dalam penyaluran dana hibah. Struktur organisasi yang sistematis mendukung implementasi program, namun masih ditemukan tantangan dalam aspek transparansi, penguatan sistem pelaporan, dan kapasitas administratif. Program dana hibah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan guru swasta meskipun bersifat tambahan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelibatan organisasi profesi pada pengelolaan dana publik guna menjamin efektivitas dan keberlanjutan kebijakan pendidikan daerah.

Katakunci: PGRI DKI Jakarta, dana hibah, guru swasta, tata kelola pendidikan, akuntabilitas, transparansi.

PENDAHULUAN

Keberadaan organisasi profesi guru seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DKI Jakarta menjadi penting dalam konteks kebijakan kesejahteraan guru sekolah swasta melalui program dana hibah yang digulirkan pada tahun anggaran 2018, sebagai bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga pendidik non-PNS sekaligus memperkuat peran organisasi profesi dalam implementasi kebijakan publik. Peran organisasi profesi dalam kebijakan pendidikan daerah menunjukkan adanya desentralisasi fungsi pengelolaan pendidikan yang semakin luas (Mulyasa, 2022).

Dana hibah yang dialokasikan melalui APBD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 dituangkan dalam pedoman teknis yang menjelaskan struktur pelaksanaan, kriteria penerima, dan mekanisme verifikasi, sehingga peran PGRI DKI tidak sekadar simbolis tetapi juga operasional dalam proses administrasi penyaluran hibah bagi guru swasta. Dalam konteks manajemen pembiayaan pendidikan, struktur pelaksanaan dan mekanisme verifikasi merupakan bagian dari fungsi perencanaan dan pengorganisasian keuangan pendidikan (Lamatenggo & Sumar, 2017)

Peran organisasi profesi dalam pengelolaan dana publik seperti dana hibah menuntut standar tata kelola yang akuntabel dan transparan, karena prinsip transparansi memungkinkan para pemangku kepentingan termasuk guru, sekolah, dan publik—untuk mengetahui penggunaan dana dan pertanggungjawaban terhadap pengeluaran tersebut. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam pengelolaan keuangan pendidikan yang menentukan efektivitas kebijakan (Utama & Setiyani, 2014).

Literatur akademik mengenai *accountability* dan *transparency* dalam pengelolaan dana pendidikan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat memperkuat kepercayaan publik dan kualitas layanan pendidikan, serta mencegah kesalahan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan awal program (Ismail & Sumaila, 2020).

Tantangan utama dalam pengelolaan dana pendidikan publik, termasuk hibah bagi guru swasta, adalah sistem pelaporan yang lemah dan kurangnya keterlibatan publik dalam pengawasan, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi di lapangan. Studi mengenai pengelolaan dana BOS menunjukkan bahwa lemahnya monitoring internal dapat memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran pendidikan (Fattah, 2012).

Beberapa studi empiris tentang pengelolaan dana pendidikan menyatakan bahwa elemen penting dalam tata kelola keuangan adalah keterbukaan informasi, struktur pengawasan internal, dan pelibatan stakeholder dalam perencanaan dan evaluasi penggunaan dana, yang semua itu dapat muncul melalui mekanisme seperti audit internal dan pelaporan publik secara berkala (Lamatenggo & Sumar, 2017).

Mekanisme verifikasi data dan administrasi penyaluran yang dijabarkan dalam pedoman teknis pengelolaan dana hibah 2018 menekankan pentingnya basis data yang sah, karena validitas data menjadi dasar utama dalam menentukan daftar guru swasta penerima hibah agar alokasi dana dapat tepat sasaran dan akuntabel. Prinsip ketepatan sasaran dalam distribusi anggaran pendidikan berkaitan erat dengan efisiensi dan efektivitas pembiayaan pendidikan.

Pemberian dana hibah melalui PGRI DKI juga berimplikasi pada kapasitas administratif organisasi profesi dalam mengelola dana publik, karena selain memerlukan kemampuan tata kelola keuangan, organisasi harus memenuhi standar akuntabilitas seperti pencatatan, pelaporan, dan evaluasi penggunaan dana. Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam manajemen pembiayaan pendidikan

modern.

Secara konseptual, akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan melibatkan pertanggungjawaban kepada publik dan pemangku kepentingan atas keputusan penggunaan dana, termasuk pelaporan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi, sehingga setiap tahapan pengelolaan hibah mulai dari penetapan kriteria penerima, verifikasi data, hingga pelaporan penggunaan dana harus dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan guna menghindari potensi konflik kepentingan. Dalam kajian pendidikan, kombinasi antara transparansi dan akuntabilitas telah dikaitkan secara positif dengan efektivitas implementasi program, karena stakeholder yang terlibat memiliki akses informasi yang cukup untuk melakukan monitoring dan evaluasi internal.

Sejalan dengan itu, kebijakan pengelolaan dana hibah yang melibatkan PGRI DKI seharusnya dirancang dengan mekanisme pengawasan yang kuat sehingga prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik (*good governance*) dapat terwujud dan membantu meminimalkan risiko penyimpangan serta mendukung objektivitas keputusan administratif.

Penerapan prinsip tata kelola yang efektif juga memberikan landasan bagi pembangunan kapasitas organisasi profesi, karena pengurus dan anggota PGRI DKI harus mampu menyusun laporan pertanggungjawaban yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta pemerintah provinsi.

Evaluasi program hibah 2018 menunjukkan perlunya memperkuat mekanisme pelaporan serta sistem kontrol internal baik di tingkat organisasi profesi maupun di tingkat pemerintah daerah, agar peran PGRI DKI dalam pengelolaan dana hibah dapat memperkuat kesejahteraan guru swasta tanpa mengesampingkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dengan demikian, kajian mendalam terhadap struktur organisasi dan peran PGRI DKI dalam pengelolaan dana hibah bagi guru swasta tahun 2018 tidak hanya relevan pada tataran administratif kebijakan tetapi juga penting untuk memperkuat basis empiris bagi rekomendasi kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif di masa depan.

METODE PENELITIAN

Untuk memperjelas tahapan metode sejarah yang digunakan dalam penelitian ini, disusun bagan alur (*flowchart*) yang menggambarkan proses penelitian secara sistematis dan berurutan. Bagan ini menunjukkan empat tahapan utama dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Setiap tahapan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan proses ilmiah yang bertujuan menghasilkan rekonstruksi sejarah yang objektif, terstruktur, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Melalui visualisasi alur penelitian ini, pembaca dapat memahami dengan lebih jelas bagaimana data dikumpulkan, diuji keabsahannya, ditafsirkan, hingga akhirnya disusun menjadi karya historiografi mengenai keorganisasian PGRI DKI Jakarta dan perannya dalam pengelolaan dana hibah guru swasta tahun 2018.



Gambar 1. Flowchart Metode Penelitian Sejarah

Berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini dimulai dari tahap heuristik sebagai proses awal pengumpulan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Sumber yang dikumpulkan meliputi dokumen resmi pemerintah daerah, arsip organisasi PGRI DKI Jakarta, pedoman teknis dana hibah tahun 2018, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan pendidikan dan tata kelola organisasi.

Tahap berikutnya adalah kritik sumber, yang terdiri atas kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan untuk memastikan keaslian dokumen dan legalitas sumber, sedangkan kritik intern bertujuan menguji kredibilitas isi sumber melalui analisis konsistensi, relevansi, dan perbandingan antar dokumen. Proses ini penting untuk memperoleh data yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Setelah sumber dinyatakan layak, dilakukan tahap interpretasi, yaitu proses penafsiran dan penghubungan fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi. Pada tahap ini, data diklasifikasikan dan dianalisis untuk menemukan hubungan sebab-akibat, dinamika organisasi, serta implikasi kebijakan dana hibah terhadap guru swasta.

Tahap terakhir adalah historiografi, yakni penyusunan hasil penelitian dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis, kronologis, dan analitis. Melalui tahapan ini, seluruh temuan penelitian dirangkai menjadi uraian ilmiah yang utuh mengenai struktur organisasi PGRI DKI Jakarta serta perannya dalam pengelolaan dana hibah tahun 2018.

Dengan demikian, alur penelitian yang ditampilkan dalam flowchart tersebut menggambarkan proses metodologis yang runtut dan terintegrasi, sehingga hasil penelitian memiliki landasan akademik

yang kuat dan dapat menjadi referensi bagi kajian sejarah kebijakan pendidikan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Keorganisasian PGRI DKI Jakarta Tahun 2018

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi PGRI DKI Jakarta pada tahun 2018 tersusun secara hierarkis mulai dari tingkat provinsi hingga cabang di wilayah kota/kabupaten administrasi. Struktur tersebut terdiri atas pengurus harian, bidang-bidang kerja, serta perangkat organisasi yang mendukung pelaksanaan program. Secara teoritis, struktur organisasi yang jelas merupakan prasyarat efektivitas implementasi kebijakan karena memungkinkan pembagian tugas, koordinasi, dan pengawasan berjalan sistematis (Robbins & Coutler, 2016).

Dalam konteks pengelolaan dana hibah, struktur ini berperan penting karena memungkinkan distribusi tugas secara terorganisasi, mulai dari pendataan anggota hingga koordinasi administratif dengan pemerintah provinsi. Hal ini sejalan dengan konsep manajemen organisasi pendidikan yang menekankan pentingnya pengorganisasian dalam mendukung keberhasilan program pembiayaan.

Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah Tahun 2018

Berdasarkan dokumen pedoman teknis dan arsip kebijakan yang dianalisis, mekanisme pengelolaan dana hibah tahun 2018 meliputi tahapan pendataan calon penerima, verifikasi dan validasi data, penetapan daftar penerima, penyaluran dana, serta pelaporan pertanggungjawaban. Dalam perspektif manajemen pembiayaan pendidikan, tahapan tersebut merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap pendataan dilakukan dengan mengacu pada kriteria administratif tertentu. Prinsip ketepatan sasaran dalam distribusi anggaran pendidikan merupakan indikator efisiensi dan efektivitas pembiayaan. Oleh karena itu, proses verifikasi menjadi krusial untuk memastikan bahwa dana hibah benar-benar diterima oleh guru swasta yang memenuhi syarat. Penyaluran dana dilakukan sesuai ketentuan anggaran daerah dan diikuti dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pelaporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas publik yang wajib dilaksanakan dalam setiap pengelolaan dana pendidikan.

Peran PGRI DKI Jakarta dalam Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PGRI DKI Jakarta memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan dana hibah, yaitu sebagai mediator antara pemerintah daerah dan guru swasta, sebagai pelaksana administratif dalam pendataan dan verifikasi, serta sebagai pengawas internal dalam memastikan dana disalurkan sesuai ketentuan.

Peran ini mencerminkan fungsi organisasi profesi dalam kerangka desentralisasi pendidikan, di mana organisasi non-pemerintah turut dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dalam teori kebijakan publik, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas aktor pelaksana serta koordinasi antar lembaga.

Tantangan dalam Pengelolaan Dana Hibah

Penelitian menemukan beberapa tantangan dalam pelaksanaan program, antara lain kompleksitas



verifikasi data guru swasta, keterbatasan kapasitas administratif di beberapa tingkat kepengurusan, serta perlunya peningkatan transparansi pelaporan kepada publik. Tantangan ini sejalan dengan temuan penelitian tentang pengelolaan dana pendidikan yang menunjukkan bahwa lemahnya sistem monitoring dan kontrol internal dapat memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan stakeholder dan mencegah potensi penyimpangan. Oleh karena itu, penguatan sistem pelaporan dan pengawasan menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan dana hibah.

Dampak Program terhadap Guru Swasta

Dari sisi kesejahteraan, dana hibah memberikan dampak positif dalam membantu kebutuhan ekonomi guru swasta, meskipun bersifat tambahan. Dalam perspektif pembiayaan pendidikan, dukungan finansial bagi tenaga pendidik berkontribusi terhadap peningkatan motivasi kerja dan kualitas layanan pendidikan. Namun demikian, efektivitas jangka panjang program tetap bergantung pada konsistensi kebijakan dan tata kelola yang baik. Implementasi kebijakan yang akuntabel dan transparan akan menentukan keberlanjutan manfaat program bagi guru swasta.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan PGRI DKI Jakarta dalam pengelolaan dana hibah guru swasta tahun 2018 merupakan bentuk konkret dari perluasan peran organisasi profesi dalam implementasi kebijakan pendidikan daerah. Dalam perspektif manajemen pendidikan, keterlibatan aktor non-pemerintah dalam pengelolaan program publik merupakan bagian dari praktik desentralisasi pendidikan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan lokal. Dengan demikian, peran PGRI tidak hanya sebagai organisasi advokasi, tetapi juga sebagai pelaksana administratif kebijakan kesejahteraan guru.

Secara struktural, temuan penelitian memperlihatkan bahwa PGRI DKI Jakarta memiliki sistem organisasi yang memungkinkan distribusi tugas dan koordinasi berjalan relatif sistematis. Dalam teori manajemen organisasi, struktur yang jelas berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program serta memperjelas garis tanggung jawab. Hal ini terlihat dalam pembagian fungsi antara pengurus provinsi dan tingkat cabang dalam proses pendataan dan verifikasi penerima hibah.

Namun demikian, efektivitas struktur organisasi sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia dan sistem administrasi yang dimiliki. Studi mengenai manajemen pembiayaan pendidikan menegaskan bahwa pengelolaan dana publik memerlukan kompetensi teknis dalam pencatatan, pelaporan, serta pengawasan internal. Dalam konteks ini, tantangan administratif yang ditemukan menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan PGRI dalam tata kelola keuangan.

Dari aspek tata kelola, prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pengelolaan dana hibah. Akuntabilitas mengharuskan setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral kepada publik. Sementara itu, transparansi menuntut keterbukaan informasi agar stakeholder memiliki akses terhadap proses dan hasil pengelolaan dana. Berdasarkan temuan penelitian, mekanisme pelaporan telah tersedia, namun perlu ditingkatkan dalam aspek keterbukaan publik dan sistem monitoring berkelanjutan.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan, keberhasilan suatu program tidak hanya

ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas aktor pelaksana dan koordinasi antar lembaga. Dalam kasus dana hibah 2018, koordinasi antara PGRI DKI Jakarta dan pemerintah provinsi menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran penyaluran dana. Hambatan yang muncul dalam verifikasi data menunjukkan bahwa integrasi sistem informasi dan sinkronisasi data masih perlu diperkuat.

Lebih lanjut, dari sisi kesejahteraan guru swasta, program dana hibah memberikan dampak positif sebagai tambahan penghasilan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam perspektif pembiayaan pendidikan, dukungan finansial terhadap tenaga pendidik memiliki korelasi dengan peningkatan motivasi kerja dan kualitas layanan pendidikan. Meskipun demikian, sifat hibah yang periodik dan terbatas menuntut adanya kebijakan lanjutan yang lebih berkelanjutan.

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa pelibatan organisasi profesi dalam pengelolaan dana publik memerlukan sistem pengawasan yang lebih kuat untuk menghindari potensi konflik kepentingan. Dalam kerangka *good governance*, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus didukung oleh regulasi yang jelas serta mekanisme audit yang independen. Dengan demikian, tata kelola yang baik tidak hanya bergantung pada niat kebijakan, tetapi juga pada sistem kontrol yang efektif. Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa peran PGRI DKI Jakarta dalam pengelolaan dana hibah tahun 2018 mencerminkan dinamika hubungan antara organisasi profesi dan pemerintah daerah dalam kebijakan pendidikan. Struktur organisasi yang memadai menjadi modal awal yang penting, namun penguatan aspek transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas administrasi tetap menjadi agenda strategis untuk memastikan keberlanjutan program dan peningkatan kesejahteraan guru swasta di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Keorganisasian PGRI DKI Jakarta dan Perannya dalam Pengelolaan Dana Hibah untuk Guru Swasta Tahun 2018*, dapat disimpulkan bahwa PGRI DKI Jakarta memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan dana hibah sebagai bagian dari program peningkatan kesejahteraan guru swasta. Peran tersebut tidak hanya bersifat representatif, tetapi juga operasional, khususnya dalam proses pendataan, verifikasi, koordinasi, serta pelaporan administrasi penyaluran dana hibah.

Struktur organisasi PGRI DKI Jakarta pada tahun 2018 secara fungsional telah memungkinkan pembagian tugas dan koordinasi yang relatif sistematis dalam pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi profesi dapat berperan sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan publik, terutama dalam konteks desentralisasi pendidikan.

Dari sisi mekanisme pengelolaan, tahapan penyaluran dana hibah telah mengikuti prosedur administratif yang mencakup perencanaan, verifikasi, penetapan penerima, penyaluran, dan pelaporan pertanggungjawaban. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa aspek transparansi publik dan penguatan sistem pengawasan internal masih perlu ditingkatkan agar prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik (*good governance*) dapat terwujud secara optimal.

Program dana hibah tahun 2018 memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan guru swasta, meskipun sifatnya sebagai bantuan tambahan (*supplementary income*). Keberhasilan jangka panjang program semacam ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, penguatan kapasitas administratif organisasi pelaksana, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.



Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keorganisasian PGRI DKI Jakarta memiliki kontribusi signifikan dalam pengelolaan dana hibah guru swasta tahun 2018, namun tetap memerlukan penguatan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas kelembagaan agar peran organisasi profesi dalam kebijakan pendidikan daerah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fattah, N. (2012). *Standar pembiayaan pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Ismail, F., & Sumaila, N. (2020). Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 1–18.
- Lamatenggo, N., & Sumar, W. T. (2017). *Manajemen Keuangan dan pembiayaan pendidikan*. Widya Padjadjaran.
- Mulyasa, H. E. (2022). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bumi aksara.
- Robbins, P. S., & Coutler, M. (2016). *Human Resources Management. Edisi 16, Jilid 1, Salemba Empat*. Jakarta.
- Utama, D. A., & Setiyani, R. (2014). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas pengelolaan keuangan sekolah terhadap kinerja guru. *Dinamika Pendidikan*, 9(2).